

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MAKASSAR 2013



*Kerjasama*

**Demerintah Kota Makassar**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

**Tahun Anggaran 2013**





## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **S A M B U T A N**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, politik maupun sosial, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan, dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan beragam data, salah satu diantaranya adalah data yang terhimpun dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2013 ini merupakan publikasi yang diterbitkan atas kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini BAPPEDA Kota Makassar dengan Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Publikasi ini berisi indikator-indikator yang merupakan cermin dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan data-data tersebut dapat membantu evaluasi dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Melalui kesempatan ini, saya menghimbau kepada Saudara Kepala Badan Pusat Statistik Kota Makassar, serta semua pihak yang terkait untuk memberikan datanya secara berkesinambungan untuk terbitnya publikasi berikutnya.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan peran masing-masing.

Makassar, Agustus 2013

WALIKOTA MAKASSAR

**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KATA PENGANTAR**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2013 merupakan publikasi yang menyajikan indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Indikator yang tersaji dalam publikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi keadaan taraf kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar, yang dilihat dari sisi bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2013 ini merupakan publikasi yang diterbitkan atas kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini BAPPEDA Kota Makassar dengan Badan Pusat Statistik Kota Makassar diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan berbagai pihak, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Akhirnya kami haturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Terima kasih.

Makassar, Agustus 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Makassar  
Kepala

**H. IBRAHIM SALEH, SE, M.Si**

NIP: 195706051982021003



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAKASSAR**

**KATA PENGANTAR**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2013 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di Kota Makassar. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, Agustus 2013

BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAKASSAR  
Kepala,

**H.ABD. HARIS. SE**  
**NIP. 196612311993011001**



---

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMBUTAN WALIKOTA MAKASSAR</b>	i
<b>KATA PENGANTAR BAPPEDA</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR BPS</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>1. Pendahuluan</b>	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang lingkup	2
1.4. Konsep dan Defenisi	3
1.5. Sumber Data	7
1.6. Sistematika Penulisan	8
<b>2. Kependudukan</b>	9
2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	11
2.2 Pertumbuhan Penduduk	11
2.3 Penyebaran Penduduk	12
2.4 komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan	14
2.5 Sex Ratio	16
2.6 Status Perkawinan	17
2.7 Formasi Keluarga	19
<b>3. Fertilitas dan Keluarga Berencana</b>	22
3.1 Usia Perkawinan Pertama	22
3.2 Jumlah Anak yang dilahirkan Hidup	24
3.3 Pemakaian alat/Cara KB	25
<b>4. Kesehatan</b>	27
4.1 Status Kesehatan Masyarakat	27

---

4.2 Keluhan Kesehatan	28
4.3 Lama Hari sakit	29
4.4 Penolong persalinan	31
4.5 Pemberian ASI	32
4.6 Sarana Kesehatan	33
<b>5. Pendidikan</b>	<b>35</b>
5.1. Sarana Pendidikan	36
5.2. Rasio Murid Guru	36
5.3. Rasio murid Sekolah	37
5.4 . Angka Partisipasi Sekolah	40
5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis	41
5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	44
<b>6. Ketenagakerjaan</b>	<b>46</b>
6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	47
6.2. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran	48
6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis pekerjaan	49
6.4. Status Pekerjaan	51
6.5. Lama Jam Bekerja	53
<b>7. Perumahan</b>	<b>54</b>
7.1 Status Penguasaan Rumah	54
7.2 Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal	56
7.3 Fasilitas Tempat Tinggal	60
7.3.1 Fasilitas Sumber Air Minum	60
7.3.2 Fasilitas Buang Air Besar	62
7.3.3 Fasilitas Penerangan	63
<b>8. Indikator Lainnya</b>	<b>65</b>
8.1 Penduduk menurut golongan dan pengeluaran perkapita	65
8.2 Kemiskinan	67
<b>Lampiran</b>	<b>72-81</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>82</b>

---

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penduduk Kota Makassar 2011-2012	10
Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan 2011 dan 2012	11
Tabel 2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar 2012	13
Tabel 2.4 Angka Beban Tanggungan Kota Makassar 2011-2012	15
Tabel 2.5 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio di Kota Makassar 2011-2012	16
Tabel 2.6 Penduduk Usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan di Kota Makassar 2011-2012	18
Tabel 2.7 Persentase Status hubungan dengan Kepala Rumahtangga di Kota Makassar tahun 2011-2012	20
Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Wanita Usia 10 Tahun Ke Atas yang pernah Kawin Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama, 2009-2010	23
Tabel 3.2 Jumlah dan persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut jumlah anak lahir hidup tahun 2011-2012	24
Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Wanita Usia 15-49 tahun yang menikah menurut Penggunaan Alat/Cara KB Kota Makassar, 2011-2012	25
Tabel 3.4 Jumlah dan Persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang kawin menurut jenis alat/cara KB yang digunakan di Kota Makassar, 2011-2012	26
Tabel 4.1 Penduduk kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2011-2012	28
Tabel 4.2 Penduduk Kota Makassar yang mengalami keluhan kesehatan menurut jenisnya tahun 2012	29
Tabel 4.3 Penduduk Penderita sakit menurut Jumlah Hari Sakit di Kota Makassar tahun 2011-2012	30
Tabel 4.4 Jumlah Balita Penolong Persalinan terakhir menurut jenis profesi di kota Makassar tahun 2011-2012	31
Tabel 4.5 Persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui di kota Makassar tahun 2011-2012	33
Tabel 4.6 Banyaknya sarana kesehatan menurut jenisnya di kota Makassar tahun 2011-2012	34
Tabel 5.1 Rasio Murid Guru di Kota Makassar tahun ajaran 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013	36
Tabel 5.2 Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar tahun ajaran 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013	37
Tabel 5.3 Rasio Murid Sekolah dan Murid Guru di Kota Makassar 2012	38
Tabel 5.4 Jumlah murid, guru dan Sekolah menurut kecamatan di kota	



---

	Makassar tahun 2012	39
Tabel 5.5	Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di Kota Makassar tahun 2011-2012	40
Tabel 5.6	Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas di Kota Makassar tahun 2011-2012	43
Tabel 5.7	Penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan di kota makassar tahun 2011-2012	44
Tabel 6.1	Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan utama selama seminggu yang lalu di kota makassar tahun 2011-2012	47
Tabel 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan tingkat Pengangguran terbuka Kota Makassar tahun 2011-2012	48
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan di kota makassar tahun 2011-2012	49
Tabel 6.4	Distribusi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan di kota makassar tahun 2011-2012	51
Tabel 6.5	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan di kota Makassar tahun 2012	52
Tabel 6.6	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jam kerja seluruhnya di kota Makassar tahun 2012	53
Tabel 7.1	Rumahtangga menurut status Penguasaan Bangunan Tempat tinggal di Kota Makassar tahun 2011-2012	55
Tabel 7.2	Persentase rumahtangga menurut luas lantai Tinggal di kota Makassar tahun 2010-2011	57
Tabel 7.3	Jumlah dan persentase Rumahtangga menurut jenis dinding Terluas di kota Makassar tahun 2011-2012	58
Tabel 7.4	Jumlah dan persentase rumahtangga menurut jenis atap terluas di Kota Makassar tahun 2011-2012	59
Tabel 7.5	Jumlah dan persentase rumahtangga menurut sumber air minum di Kota Makassar tahun 2011-2012	61
Tabel 7.6	Jumlah dan persentase rumahtangga menurut fasilitas tempat buang air besar di Kota Makassar tahun 2011-2012	63
Tabel 7.7	Jumlah dan Persentase rumahtangga menurut fasilitas penerangan di kota Makassar tahun 2011-2012	64
Tabel 8.1	Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Perkapita per Bulan di Kota Makassar tahun 2012	66
Tabel 8.2	Pengeluaran perkapita se bulan dan pola konsumsi di Kota Makassar tahun 2011-2013	67
Tabel 8.3	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase dan GK tahun 2007-2012	69

---

Lampiran		
Tabel 1.	Jumlah Penduduk Pertengahan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2011-2012	72
Tabel 2.	Jumlah APS 7-12 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 Menurut Kab/Kota	73
Tabel 3.	Jumlah APS 13-15 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 Menurut Kab/Kota	74
Tabel 4.	Jumlah APS 16-18 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 Menurut Kab/Kota	75
Tabel 5.	Jumlah APS 19-25 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 Menurut Kab/Kota	76
Tabel 6.	Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kab/kota	77
Tabel 7.	Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kab/kota	78
Tabel 8.	Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki + Perempuan Menurut Kab/kota	79
Tabel 9.	Penduduk Usia 15+ menurut Indikator Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan menurut TPT dan TPAK tahun 2012	80
Tabel 10.	Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2012	81

---

<http://makassarkota.bps.go.id>

---

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Penduduk menurut laki-laki dan Perempuan di Kota Makassar	10
Grafik 2. Distribusi Luas Wilayah dan Penduduk Kota Makassar 2012	14
Grafik 3. Persentase penduduk Kota Makassar menurut Status Perkawinan	19
Grafik 4. Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya di Kota Makassar tahun 2011-2012	34
Grafik 5. Persentase Kemampuan Baca Tulis Penduduk usia 10 + ke atas	43
Grafik 6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan	45
Grafik 7. Persentase rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar tahun 2010-2011	57
Grafik 8. Persentase rumahtangga menurut Jenis dinding Di Kota Makassar tahun 2012	58
Grafik 9. Persentase rumahtangga menurut Jenis Atap terluas di Kota Makassar tahun 2011-2012	60
Grafik 10. Persentase rumahtangga menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar tahun 2011-2012	62
Grafik 11. Persentase rumahtangga menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar tahun 2011-2012	64
Grafik 12. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar tahun 2007-2012	70

---

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukupi kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materiil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang-undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi. Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tulis, mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berpenghasilan yang layak, emnghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk mengukur pelaksanaan

---

pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Disinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

## **1.2 . Tujuan**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2013 diterbitkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar. Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada masa yang akan datang)

## **1.3 Ruang Lingkup**

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan,

---

melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat perlu adanya fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

#### **1.4 Konsep dan Defenisi**

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

**Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah :**

##### ***Rumah Tangga Biasa***

Adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

---

**Rumah Tangga Khusus**

Adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

**Kepadatan penduduk**

Rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi

**Rasio Jenis Kelamin**

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

**Kawin**

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

**Cerai Hidup**

Adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

**Cerai Mati**

Adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

**Metode Kontrasepsi**

Adalah alat/cara pencegah kehamilan.

**Sekolah**

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.



---

***Tidak atau Belum Pernah Sekolah***

Adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat. Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

***Masih Bersekolah***

Adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

***Tidak Sekolah lagi***

Adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

***Melek Huruf***

Adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

***Angka partisipasi Sekolah***

Adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

***Keluhan Kesehatan***

Adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

***Bekerja***

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

---

**Menganggur**

Adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

**Penduduk Usia Kerja**

Adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

**Angkatan Kerja**

Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia 10 tahun keatas.

$$TPAK = \frac{AK}{P_{10+}} \times 100$$

Keterangan :

AK = Angkatan Kerja

P10+= Penduduk usia 10 tahun keatas

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{TM}{AK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan

AK = Jumlah Angkatan Kerja

---

### **Angka Beban Tanggungan**

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

- **Penduduk Muda** adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.
- **Penduduk Tua** adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

### **1.5. Sumber Data**

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumah tangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

---

## 1.6 Sistematika Penulisan

Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan defenisi, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumahtangga, fertilitas dan keluarga berencana.

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi sarana kesehatan, keluhan kesehatan, penolong persalinan, serta pemberian ASI.

Bab keempat, dibahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru, rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Bab kelima, digambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Bab keenam, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

Bab ketujuh, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumahtangga yang mencakup pengeluaran rumahtangga menurut golongan pengeluaran.

---

## **BAB II KEPENDUDUKAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi lembaga swasta non profit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status perkawinan.

### **2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk Kota Makassar pada pertengahan 2012 berdasarkan hasil proyeksi penduduk tercatat jumlah penduduk sekitar 1.369.606 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 676.744 jiwa dan perempuan 692.862 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari

jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar 97,67. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar pada 14 kecamatan terdiri dari 143 kelurahan dengan total luas 175,77 km<sup>2</sup>, sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar sekitar 7.792 jiwa per km<sup>2</sup>.

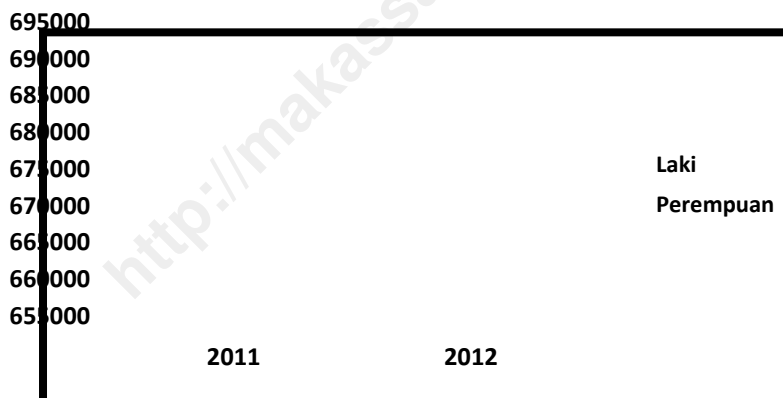
Tabel 2.1

Penduduk Kota Makassar Tahun 2011 dan 2012

Uraian	Tahun	
	2011	2012
1. Jumlah Penduduk	1.352.136	1.369.606
- Laki-laki	667.681	676.744
- Perempuan	684.455	692.862
2. Rasio Jenis Kelamin	97,55	97,67
3. Kepadatan penduduk	7.693	7.792

Grafik 1.

Penduduk Menurut Laki-laki dan Perempuan di Kota Makassar



---

## 2.2 Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas, sebab upaya ini merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2011 dan 2012 sebesar 1,29 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 0,92. persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 1.

Tabel 2.2  
Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan  
Tahun 2011 dan 2012

wilayah	2011	2012	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Makassar	1.352.136	1.369.606	1,29
Provinsi Sulawesi Selatan	8.115.638	8.190.222	0,92

Sumber : Makassar Dalam Angka 2013, BPS

## 2.3 Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya. Apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena

---

bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 tercatat 1.369.606 jiwa yang tersebar pada 14 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 7.792 jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.305 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 32.550 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat enam kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 jiwa/km<sup>2</sup>, Tamalanrea 31,84 jiwa/km<sup>2</sup>, Manggala 24,14 jiwa/km<sup>2</sup> dan Tamalate 20,21 jiwa/km<sup>2</sup>).

Pola yang berbeda ditunjukkan pada Tabel 2.3 adalah distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan yang cenderung lebih merata, meski terdapat lima kecamatan memiliki persentase penduduk lebih dari 10 persen. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sekitar 12,93 persen, Tamalate (12,92) persen, Rappocini (11,26 persen), Panakkukang (10,39 persen) dan Tallo (9,84 persen).

Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki



pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi, begitupun dengan wilayah pengembangan baru seperti Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala saat ini sudah dijadikan pusat niaga dan telah cenderung memiliki konsentrasi penduduk yang sudah padat.

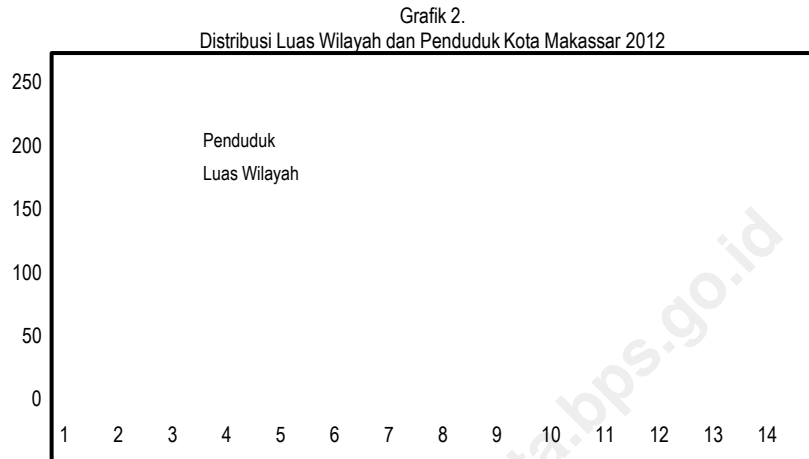
Tabel 2.3  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan  
2012

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)	Penduduk	(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mariso	1,82	1,04	56.524	4,13	31.057
02. Mamajang	2,25	1,28	59.170	4,32	26.298
03. Tamalate	20,21	11,50	176.947	12,92	8.755
04. Rappocini	9,23	5,25	154.184	11,26	16.705
05. Makassar	2,52	1,43	82.027	5,99	32.550
06. Ujung Pandang	2,63	1,50	27.201	1,99	10.343
07. Wajo	1,99	1,13	29.630	2,16	14.889
08. Bontoala	2,10	1,19	54.515	3,98	25.960
09. Ujung Tanah	5,94	3,38	47.129	3,44	7.934
10. Tallo	5,83	3,32	134.783	9,84	23.119
11. Panakkukang	17,05	9,70	142.308	10,39	8.347
12. Manggala	24,14	13,73	122.838	8,97	5.089
13. Biringkaya	48,22	27,43	177.116	12,93	3.673
14. Tamalanrea	31,84	18,11	105.234	7,68	3.305
Jumlah	175,77	100,00	1.369.606	100,00	7.792

Sumber : Makassar Dalam Angka 2013, BPS

---

Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala.



#### 2.4 Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan

Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya *dependency ratio* (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut “beban ketergantungan”. Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut.

Dari tabel 2.4 di bawah ini, dimana beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2011 sekitar 45,68 persen dan naik menjadi 49,44 persen pada tahun 2012. Angka tersebut pada tahun 2012 memberikan gambaran bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 49 penduduk usia tidak produktif. Naiknya angka beban ketergantungan pada tahun 2012 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan penduduk berusia non produktif (65 + tahun) pada tahun 2012.

Tabel 2.4  
Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2011 - 2012

Angka Beban Ketergantungan	2011			2012		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Muda (0-14 thn /15-64 thn)	43,10	38,59	40,79	45,95	42,58	44,23
Penduduk Tua (65+ /15-64 thn)	4,15	5,59	4,89	4,60	5,80	5,21
Total	47,25	44,18	45,68	50,55	48,38	49,44

Sumber : Makassar Dalam Angka 2013, BPS

Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+), maka angka beban tanggungan dibedakan menjadi angka beban tanggungan penduduk muda dan angka beban tanggungan penduduk tua. Dalam kurun 2011-2012 angka beban tanggungan penduduk muda naik dari 40,79 persen menjadi 44,23 persen, sejalan dengan meningkatnya proporsi penduduk usia muda. Namun demikian penduduk muda masih dominan sebagai beban tanggungan penduduk usia produktif, karena angka beban tanggungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 5,21 persen pada tahun 2011 dan 2012.

## 2.5 Sex Ratio

Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 sekitar 97,67 persen, artinya di Kota Makassar terdapat 97 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.5  
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut  
Kelompok Umur di Kota Makassar  
2011-2012

Kelompok Umur	2011			2012		
	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	67.025	62.530	107,19	67.935	63.298	107,33
5 - 14	128.414	120.651	106,43	130.157	122.133	106,57
15 - 64	453.428	474.715	95,52	459.585	459	95,64
65 +	18.814	26.559	70,84	19.067	26.886	70,92
Total	667.681	684.455	97,55	676.744	692.862	97,67

Sumber : Makassar Dalam Angka 2013, BPS

---

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-14 tahun sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok penduduk tua (65+) sex rasionya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa, jumlah laki-laknya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

## **2.6 Status Perkawinan**

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suami-isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati. Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka

yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

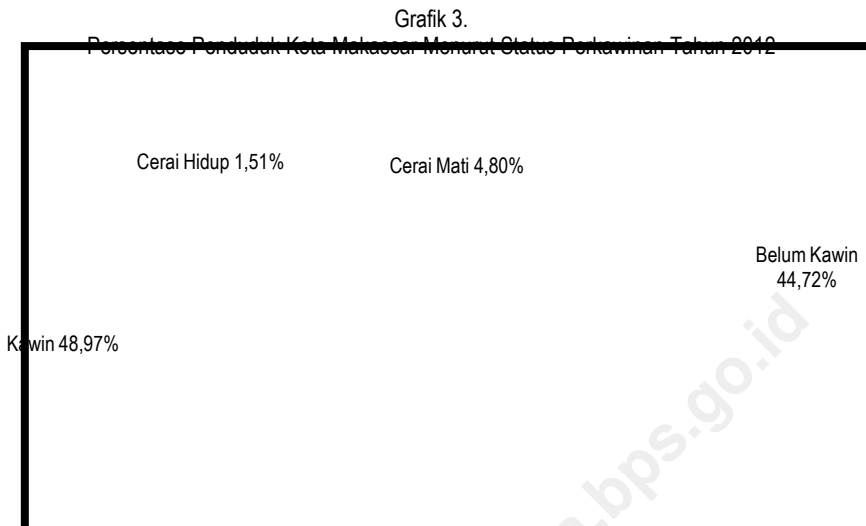
Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas tahun 2011 dan 2012. Nampak bahwa proporsi penduduk berstatus kawin mengalami penurunan sekitar 0,76 persen selama tahun 2011-2012, yaitu dari 49,73 persen menjadi 48,97 persen. Begitupun dengan status perkawinan cerai hidup dan cerai mati mengalami pula penurunan yakni sekitar 0,60 persen dan 0,78 persen di tahun 2011.

Sedangkan penduduk laki-laki yang berstatus cerai hidup mengalami peningkatan lebih sedikit sekitar 0,35 persen yakni dari 0,66 persen menjadi 1,01 persen. Hal ini karena di dalam Islam, perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Islam tetapi dibolehkan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu.

Tabel 2.6  
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan  
Kota Makassar 2011 - 2012

Status Perkawinan	2011			2012		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	232.738 (44,85)	228.691 (40,49)	461.429 (42,57)	256.054 (47,31)	239.305 (42,25)	495.359 (44,72)
Kawin	270.348 (52,10)	268.584 (47,55)	538.933 (49,73)	268.341 (49,58)	274.122 (48,40)	542.463 (48,97)
Cerai Hidup	3.420 (0,66)	19.494 (3,45)	22.915 (2,11)	5.471 (1,01)	11.248 (1,99)	16.719 (1,51)
Cerai Mati	12.439 (2,40)	48.088 (8,51)	60.528 (5,58)	11.382 (2,10)	41.739 (7,37)	53.121 (4,80)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012



## 2.7 Formasi Keluarga

Keluarga yang dimaksud dalam publikasi ini adalah rumahtangga. Dalam suatu rumahtangga biasanya dikepalai oleh seorang kepala rumahtangga, yaitu orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam rumahtangga tersebut, atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumahtangga. Selain kepala rumahtangga, terdapat pula anggota rumahtangga lain menurut hubungan dengan kepala rumahtangga seperti istri/suami, anak kandung, anak tiri/adopsi, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu rumahtangga, sopir, tukang kebun dan anggota rumah tangga lainnya artinya mereka yang tidak ada hubungan family dengan kepala rumahtangga atau dengan istri/suami kepala rumahtangga, misalnya mantan menantu atau anak kost.

Tabel 2.7  
 Persentase Status Hubungan dengan Kepala Rumahtangga Penduduk Kota Makassar  
 2011 - 2012

Hubungan dengan Kepala Rumahtangga	2011			2012		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepala Rumahtangga	248.980 (37,80)	59.110 (8,52)	303.090 (22,79)	332.042 (49,06)	66.645 (9,62)	398.687 (29,11)
Isteri/Suami	1.325 (0,20)	218.741 (31,54)	220.066 (16,28)	351 (0,05)	281.376 (40,61)	281.727 (20,57)
Anak	297.635 (45,19)	285.668 (41,19)	583.304 (43,14)	242.640 (35,85)	221.165 (31,92)	463.805 (33,86)
Menantu	19.269 (2,93)	14.497 (2,09)	32.766 (2,50)	18.980 (2,80)	14.783 (2,13)	33.763 (2,47)
Cucu	38.275 (5,81)	37.312 (5,38)	75.587 (5,59)	17.530 (2,59)	10.785 (1,56)	28.314 (2,07)
Orangtua/Mertua	5.276 (0,80)	14.977 (2,16)	20.523 (1,50)	3.229 (0,48)	18.721 (2,70)	21.949 (1,60)
Famili lain	42.381 (6,43)	48.565 (7,00)	90.947 (6,73)	61.973 (9,16)	79.388 (11,46)	141.361 (10,32)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

Pada tabel 2.7 nampak bahwa semua laki-laki yang berstatus sebagai suami menjadi kepala rumahtangga. Sedangkan dari seluruh perempuan di Kota Makassar tahun 2012 yang berperan sebagai kepala rumahtangga sekitar 9,62 persen. Secara keseluruhan penduduk di Kota Makassar yang berperan sebagai kepala rumahtangga yaitu sekitar 29,11 persen dan anak sekitar 33,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap kepala rumahtangga menanggung sekitar 2 - 3 anak.



---

Peningkatan proporsi laki-laki sebagai kepala rumahtangga merupakan indikasi semakin banyaknya keluarga baru yang terbentuk selama kurun waktu 2011-2012. Sedangkan peningkatan proporsi perempuan sebagai kepala rumahtangga diduga bertalian erat dengan meningkatnya status cerai penduduk perempuan.

Dari komposisi penduduk menurut hubungan dengan kepala rumahtangga, nampak bahwa masyarakat Kota Makassar masih banyak yang menganut sistim keluarga luas (*extended family*). Artinya rumahtangga yang dibangun memiliki lebih dari satu keluarga inti, atau terdiri 2 sampai 3 keluarga dalam satu rumahtangga.

<http://makassarkota.bps.go.id>

---

## **BAB. III**

### **FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA**

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Himbuan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran merupakan usaha nyata dalam merealisasikan tujuan tersebut.

#### **3.1 Usia Perkawinan Pertama**

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (lebih dari 20 tahun) bagi perempuan akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan. Sementara persalinan yang dilakukan pada ibu usia kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun, pernah hamil empat kali/lebih, atau jarak waktu kelahiran terakhir kurang dari dua tahun akan semakin memperbesar resiko persalinan.

Tabel 3.1  
Jumlah dan Persentase Wanita Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama Kota Makassar 2011 - 2012

Tahun	Umur Perkawinan Pertama		
	10-17	18-24	25 +
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	51.919 (15,44)	197.505 (58,76)	86.744 (25,80)
2012	53.241 (19,42)	145.456 (53,06)	75.425 (27,51)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011 - 2012

Tabel 3.1 memperlihatkan selama kurun 2011 - 2012 yang menikah pertama pada usia diatas 25 tahun persentasenya mengalami kenaikan dari 25,80 persen menjadi 27,51 persen tahun 2012. Pada tahun 2011, persentase perempuan yang menikah dibawah usia 17 tahun mengalami pula kenaikan dari 15,44 persen menjadi 19,42 persen pada tahun 2012. Sebaliknya pada kelompok perempuan yang menikah di umur 18-24 tahun, persentasenya sebesar 53,06 persen atau mengalami penurunan sekitar 5,70 persen dibandingkan dengan keadaan tahun 2011 yang mencapai 58,76 persen.

Fenomena ini tentunya mengindikasikan perkembangan kearah yang positif dimana masyarakat semakin sadar resiko menikah dini. Namun demikian patut menjadi perhatian yang serius mengingat masih banyaknya masyarakat yang menikahkan anak gadisnya dibawah 17 tahun. Faktor budaya yang tercermin dari sikap sebahagian orangtua yang merasa takut anaknya menjadi perawan tua, pemahaman yang masih rendah tentang lembaga perkawinan, juga adanya globalisasi yang menyebabkan akses dunia hiburan yang tak terkontrol dan faktor pergaulan yang bebas merupakan faktor penyebab masih banyaknya penduduk yang menikah pada usia dini.

---

### 3.2 Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup

Fertilitas merupakan komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami. Karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang melahirkan anak. Jika tingkat fertilitas tidak bisa dikendalikan maka ledakan jumlah penduduk akan terjadi yang pada gilirannya hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan.

Tingkat fertilitas ditunjukkan oleh data jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita pernah kawin.

Tabel 3.2  
Jumlah dan Persentase Wanita Usia 10 tahun Keatas yang Pernah Kawin  
Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup di Kota Makassar 2011 - 2012

Jumlah Anak Lahir Hidup	2011		2012	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	31.428	9,35	22.589	8,24
1	60.423	17,97	47.535	17,34
2	69.970	20,78	64.370	23,48
3	59.294	17,64	55.941	20,41
4	42.278	12,58	33.869	12,36
5+	72.876	21,68	49.816	18,17

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011 - 2012

Jika dilihat dari jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita pernah kawin, Nampak bahwa wanita pernah kawin di tahun 2012 yang mempunyai anak lahir hidup minimal 1 orang sebesar 17,34 persen, menurun dibanding tahun 2011 yaitu 17,97 persen. Disisi lain wanita pernah kawin yang mempunyai anak 4 orang atau lebih pada tahun 2011 sekitar 12,58 persen, atau turun menjadi 12,36 persen tahun 2012.

### 3.3 Pemakaian Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumahtangga.

Tabel 3.3 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstaus kawin-Selama kurun waktu 2011-2012, persentase penduduk yang sedang ikut menggunakan alat/cara KB mengalami kenaikan sekitar 1,91 persen yakni dari 48,09 persen di tahun 2011 menjadi 50,00 persen di tahun 2012.

Tabel 3.3  
Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15- 49 Tahun yang Menikah Menurut Penggunaan Kontrasepsi  
Kota Makassar, 2011 – 2012

Tahun	Pengguna/Memakai alat/Cara KB		
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	103.255 (48,09)	45.754 (21,32)	85.670 (30,59)
2012	112.104 (50,00)	54.478 (24,30)	57.632 (25,70)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

Tabel 3.4 menyajikan persentase wanita umur 15-49 tahun yang bestatus kawin menurut jenis alat/cara KB yang sedang digunakan. Pemakaian jenis kontrasepsi seperti MOW/MOP, AKDR/IUD, suntikan, susuk KB, terlihat mengalami peningkatan pemakaian alat/cara KB tahun 2012, sedangkan penggunaan jenis kontrasepsi Pil tahun 2012 mengalami penurunan dari 27,94 persen tahun 2011 menjadi 17,89 persen tahun 2012, hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa jenis kontrasepsi Pil KB pada dasarnya memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mencegah kehamilan, akan tetapi dalam pemakaiannya karena faktor kesalahan manusia yang sering terjadi lupa minum pil KB. Sampai dengan tahun 2012 penggunaan suntik KB masih menduduki peringkat pertama sebesar 67,94 persen, diikuti penggunaan pil KB sebesar 17,89 persen, dan yang paling rendah persentasenya adalah jenis kontrasepsi MOW/MOP sebesar 3,44 persen.

Tabel 3.4  
Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2010 - 2012

Jenis Kontrasepsi	2011	%	2012	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MOW/MOP	2.523	(2,44)	3.876	3,46
AKDR/IUD	3.763	(3,65)	8.586	7,66
Suntikan	60.586	(58,69)	76.162	67,94
Susuk	3.098	(3,00)	3.421	3,05
Pil	28.841	(27,94)	20.058	17,89
Lainnya	4.412	(4,27)	(0,00)	(0,00)

Sumber : BPS Kota Makassar , Susenas 20110-2012

Banyaknya akseptor yang menggunakan suntikan KB bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif lebih praktis dan mudah dilakukan begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor.

---

## **BAB IV KESEHATAN**

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata.

Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah hari sakit.

### **4.1 Status Kesehatan Masyarakat**

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventatif. Pola hidup tersebut juga sangat tergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

---

## 4.2 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh. Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hanya sebesar 29,74 persen, atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2011 yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 46,32 persen, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan.

Tabel 4.1  
Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan  
2011 - 2012

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	85.686 (49,13)	77.293 (43,56)	162.979 (46,32)
2012	191.627 (28,32)	215.685 (31,13)	407.312 (29,74)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

Tabel 4.2 di bawah ini memperlihatkan tujuh jenis keluhan kesehatan yang utama dialami penduduk Kota Makassar pada tahun 2012. Untuk tahun 2012 jenis penyakit batuk yang paling banyak dikeluhkan penduduk kota Makassar, tercatat 14,10 persen penduduk Kota Makassar menyatakan pernah mengalami keluhan batuk selama sebulan terakhir. Kemudian diikuti oleh keluhan pilek sebanyak 13,29 persen dan panas 12,10 persen. Meski diare menempati posisi ketujuh yang banyak dikeluhkan, jenis keluhan ini adalah yang paling berbahaya, karena dapat



mewabah dan berakhir pada kematian. Data tahun 2012, penderita penyakit diare mencapai 2,47 persen.

Tabel 4.2  
Penduduk Kota Makassar yang mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Keluhan  
2012

Jenis Keluhan Kesehatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	L + P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Panas	24.871	(12,98)	24.261	(11,25)	49.133	(12,10)
Batuk	28.601	(14,93)	28.650	(13,28)	57.251	(14,10)
Pilek	25.988	(13,56)	28.103	(13,03)	54.092	(13,29)
Asma/sesak nafas	3.350	(1,75)	3.878	(1,80)	7.227	(1,77)
Diare	3.441	(1,80)	6.748	(3,13)	10.189	(2,47)
Sakit kepala berulang	10.533	(5,50)	17.036	(7,90)	27.568	(6,71)
Sikat gigi	4.171	(2,18)	9.694	(4,49)	13.865	(3,35)
Lainnya	8.192	(4,28)	10.362	(4,80)	18.554	(4,54)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

### 4.3 Lama Hari Sakit

Lama hari sakit dihitung menurut lama mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sedangkan jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita.

Jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita

semakin banyak jumlah hari sakit semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.

Hasil Susenas 2012 di Kota Makassar menunjukkan bahwa dari semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang paling banyak adalah mereka yang mengalami keluhan kurang dari 4 hari yaitu sekitar 66,71 persen, jumlah hari sakit 4-7 hari sekitar 27,90 persen, 8-14 hari sekitar 3,19 persen, 15-21 hari sakit sebesar 0,20 persen, sedangkan yang mengalami keluhan kesehatan lebih setengah bulan sekitar 1,99 persen (Lihat tabel 4.3).

Tabel 4.3  
Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit  
Kota Makassar, 2011 - 2012

Jumlah Hari Sakit	2011			2012		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 4	52.215 (60,94)	46.386 (60,01)	98.601 (60,50)	123.675 (64,54)	148.565 (68,88)	272.240 (66,71)
4 – 7	25.245 (29,46)	21.600 (27,95)	48.845 (28,74)	55.911 (29,18)	57.447 (26,63)	113.358 (27,90)
8 - 14	3.463 (4,04)	3.186 (4,12)	6.648 (4,08)	9.851 (5,14)	2.690 (1,25)	12.541 (3,19)
15 – 21	634 (0,74)	881 (1,14)	1.515 (0,93)	12 (0,01)	839 (0,39)	851 (0,20)
22 - 30	4.130 (4,82)	5.240 (6,78)	9.370 (5,75)	2.178 (1,14)	6.145 (2,85)	8.323 (1,99)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

#### 4.4 Penolong Persalinan

Penolong persalinan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan/kesehatan bayi dan ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan diyakini lebih baik dibandingkan tenaga non medis.

Penolong persalinan dapat dijadikan indikator bidang kesehatan terutama dalam kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak serta mutu pelayanan kesehatan secara umum. Tempat persalinan yang khusus disertai dengan peralatan yang baik dan ditolong oleh petugas yang terampil, diperkirakan akan lebih baik bila dibandingkan dengan tempat bersalin di rumah, dengan peralatan sederhana dan ditolong oleh tenaga non medis.

Tabel 4.4  
Jumlah Balita Penolong Persalinan Terakhir Menurut Jenis Profesi  
Kota Makassar 2011 – 2012

Tahun	Penolong persalinan Terakhir					
	Dokter	Bidan	Paramedis	Dukun	Keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
2011	58.521 (45,08)	69.097 (53,22)	- (0,00)	1.675 (1,24)	528 (0,41)	- (0,00)
2012	49.360 (37,61)	78.991 (60,19)	- (0,00)	2.882 (2,20)	- (0,00)	- (0,00)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2010-2012

Penolong persalinan di Kota Makassar selama kurun waktu 2011-2012 masih didominasi oleh tenaga Bidan, yaitu sebesar 60,19 persen. Disisi lain pemanfaatan tenaga dokter sebagai penolong persalinan mengalami penurunan menjadi 37,61 persen pada tahun 2012 menurun sekitar 7,47

---

persen dari tahun 2011. Dari Tabel 4.4 juga terlihat bahwa masih ada masyarakat yang memanfaatkan dukun sebagai penolong kelahiran. Hal ini perlu dikaji lebih dalam guna mendapat faktor-faktor penyebabnya, apakah karena akses ke tenaga medis masih sulit atau faktor biaya persalinan yang mahal.

#### **4.5 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)**

Sekarang ini pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan pemanfaatan air susu ibu (ASI) bagi balita. Hal ini karena dalam pertumbuhan dan perkembangan balita sangat memerlukan air susu ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal untuk pertumbuhan bayi sebab selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh. Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit.

Pemberian ASI merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran ibu terhadap kesehatan anak. Tabel 4.5 memperlihatkan persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lamanya disusui di Kota Makassar.

Jika dilihat dari lamanya disusui pada balita (Tabel 4.5), nampak selama kurun 2011-2012 persentase lamanya disusui mengalami peningkatan, yang berarti menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kesadaran penduduk akan pentingnya ASI bagi bayi.

Di Kota Makassar tahun 2012, persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui antara umur 1-5 bulan yaitu sekitar 5,22 persen, kemudian lamanya disusui umur 6-11 bulan sekitar 14,32 persen, lama disusui 12-17 bulan sekitar 30,46 persen, lama disusui 18-23 bulan sekitar 8,88 persen dan lamanya disusui 2 tahun lebih terdapat sekitar 41,12 persen balita. Ini berarti bahwa kesadaran ibu akan arti pentingnya ASI bagi bayi sudah relative baik, karena pemberian ASI kepada bayi lebih efisien jika dilihat dari segi ekonomi, sebab ASI jauh lebih murah

jika dibandingkan dengan susu formula. Akan tetapi, bagi ibu yang tetap memberikan ASI pada bayinya, mungkin hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya.

Tabel 4.5  
Persentase Anak Usia 2- 4 tahun yang pernah Disusui Menurut Lama Disusui  
Kota Makassar 2011 – 2012

Lama Disusui (Bulan)	2011			2012		
	L (%)	P (%)	L+ P (%)	L (%)	P (%)	L+ P (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1-5	(10,37)	(11,70)	(11,00)	(16,76)	(16,53)	(16,64)
6-11	(13,22)	(17,76)	(15,34)	(18,98)	(15,57)	(17,32)
12-17	(26,75)	(29,36)	(27,97)	(37,48)	(33,70)	(35,64)
18-23	(16,46)	(9,51)	(12,97)	(7,95)	(10,56)	(9,22)
24+	(25,49)	(24,38)	(24,97)	(14,06)	(16,50)	(15,25)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

#### 4.6 Sarana Kesehatan

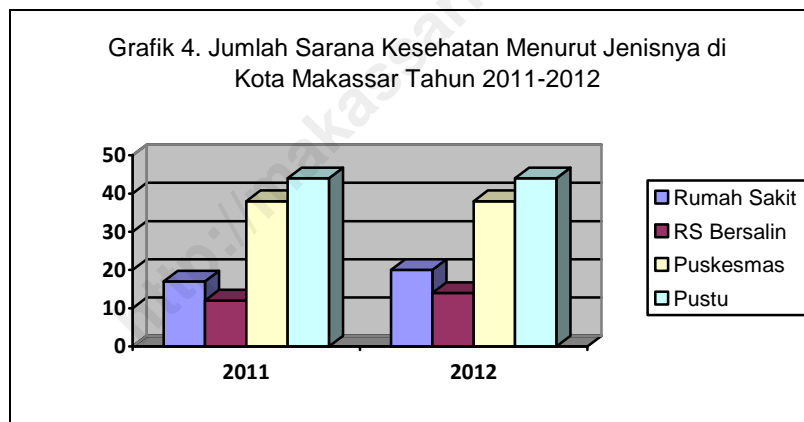
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan

kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

Tabel 4.6  
Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2011 – 2012

Sarana Kesehatan	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Sakit	20	20
2. RS. Bersalin	14	15
3. Puskesmas	38	39
4. Puskesmas Pembantu	44	43
Jumlah	116	117

Sumber : Dinkes Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)



---

## **BAB V PENDIDIKAN**

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan melalui konsep "link and match", yaitu relevansi strategi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

### **5.1 Sarana Pendidikan**

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling

dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan.

## 5.2 Rasio Murid Guru

Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru dengan mudah memantau murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Tabel 5.1

Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Guru		
	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/Sederajat	24	23	22
S M P/ederajat	14	15	15
S M A/Sederajat	9	11	9

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar dalam Angka 2013)

Tabel 5.1 secara umum RMG menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas sudah semakin baik. Rasio murid guru pada jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2012/2013 yaitu 22 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 22 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 15 atau terdapat sekitar 15 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat sekitar 9 atau terdapat sekitar 9 murid diajar oleh seorang guru.



---

### 5.3 Rasio Murid Sekolah

Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Rasio murid sekolah (RMS) untuk semua jenjang pendidikan sekolah di Kota Makassar pada tahun ajaran 2012/2013 menunjukkan angka yang tinggi dibanding tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2012/2013 RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 319 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/ sederajat sebanyak 325 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 246 murid/ siswa setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2  
Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Sekolah		
	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/ Sederajat	320	329	319
S M P/ Sederajat	263	350	325
S M A/ Sederajat	307	445	246

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)

Telaah lebih lanjut di tingkat kecamatan, nampak adanya variasi yang relatif besar pada rasio murid sekolah. Rentang rasio murid sekolah tingkat SD berada pada kisaran terendah 250 di Kecamatan Wajo hingga tertinggi 402 di kecamatan Biringkanaya. Sedangkan pada tingkat SMP, rasio murid sekolah terendah 141 di kecamatan Wajo dan tertinggi 474 di kecamatan Tamalanrea. Pada tingkat SMA, rasio murid sekolah terendah 157 di kecamatan Mamajang dan tertinggi 470 di kecamatan Bnontoala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.3 dan 5.4

Tabel 5.3  
Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru Menurut Kecamatan  
di Kota Makassar 2012

Kecamatan	SD		SMP		SMA	
	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Mariso	290	22	449	28	262	8
02. Mamajang	394	26	425	17	130	5
03. Tamalate	293	21	523	16	335	10
04. Rappocini	287	18	253	11	352	12
05. Makassar	298	22	149	11	157	7
06. Ujung Pandang	347	21	400	26	306	9
07. Wajo	250	20	141	8	234	6
08. Bontoala	261	20	162	17	470	15
09. Ujung Tanah	305	27	261	14	254	10
10. Tallo	325	25	333	14	185	7
11. Panakkukang	297	18	273	16	145	6
12. Manggala	337	23	369	15	214	8
13. Biringkaya	402	23	474	14	329	9
14. Tamalanrea	348	26	319	16	141	7
Jumlah	319	22	325	15	246	9

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)

Tabel 5.4  
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Kecamatan  
di Kota Makassar 2012

Kecamatan	SD			SMP			SMA		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Mariso	19	5.518	252	7	3.146	114	17	4.452	528
02. Mamajang	24	9.446	367	10	4.249	253	19	2.468	473
03. Tamalate	42	12.303	579	13	6.798	419	16	5.352	535
04. Rappocini	50	14.325	787	18	4560	414	22	7.736	648
05. Makassar	38	11.342	513	17	2.541	241	13	2.045	282
06. Ujung Pandang	30	10.398	487	17	6.803	258	10	3.058	352
07. Wajo	15	3.754	188	8	1.130	138	10	2.344	362
08. Bontoala	23	6.000	301	11	1.785	105	10	4.695	323
09. Ujung Tanah	21	6.414	242	11	2.867	199	6	1.522	156
10. Tallo	44	14.304	561	13	4.330	319	6	1.107	148
11. Panakkukang	45	13.344	748	16	4.373	269	24	3.469	563
12. Manggala	34	11.449	503	15	5.540	380	17	3.636	447
13. Biringkaya	43	17.273	741	18	8.523	595	19	6.253	699
14. Tamalanrea	30	10.426	402	14	4.462	280	15	2.116	313
Jumlah	458	146.296	6.671	188	61.107	3.984	204	50.253	5.829

Sumber, Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)

Tingginya rasio murid sekolah, seyogyanya dapat diantisipasi dengan memperbanyak sarana dan fasilitas ruang kelas di masing-masing sekolah. Demikian juga dengan ketersediaan tenaga pengajar di tingkat SD utamanya daerah-daerah terpencil dan daerah sulit, sangat perlu dilakukan penambahan dan redistribusi sehingga diperoleh keseimbangan rasio murid guru. Namun untuk tingkat SMP dan SMA rasio murid guru sudah baik. Dengan demikian harapan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dicapai.

#### 5.4 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplementasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.5  
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun  
Kota Makassar 2011 – 2012

Jenis Kelamin	2011			2012		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	88.413 (97,92)	29.729 (80,83)	28.889 (60,63)	43.439 (96,46)	31.753 (96,34)	26.622 (67,61)
Perempuan	71.109 (97,96)	33.280 (89,86)	31.302 (63,10)	43.001 (97,58)	36.506 (94,10)	24.520 (71,97)
Laki-laki + Perempuan	159.526 (97,94)	63.053 (85,42)	60.161 (61,89)	86.410 (96,98)	68.259 (95,13)	51.142 (69,63)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

Tabel 5.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun di Kota Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. Keadaan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Namun ada pergeseran yang cukup menggembirakan bahwa selama kurun 2011-2012 terjadi peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

---

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2012 mencapai 96,98 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 96 penduduk yang masih aktif bersekolah. Untuk penduduk usia ini, partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih besar dari pada laki-laki yaitu sekitar 96,46 persen dan perempuan sekitar 97,58 persen.

Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai sekitar 95,13 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, ada perbedaan yang cukup dimana partisipasi penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu 96,34 persen untuk laki-laki dan 94,10 persen untuk perempuan.

Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai 69,63 persen. Perbedaan yang cukup justru terjadi partisipasi penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada partisipasi penduduk perempuan dengan perbedaan sekitar 4,36 poin. Partisipasi penduduk laki-laki sebesar 67,61 persen, sedangkan partisipasi penduduk perempuan sebesar 71,97 persen.

Adanya program pendidikan gratis di Kota Makassar untuk sekolah SD dan SMP telah meningkatkan angka partisipasi sekolah di kota ini. Kemudian jika masih ada penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, sangat perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian perlu pembuktian lebih dalam dugaan bahwa penduduk usia sekolah 7-18 tahun di Kota Makassar banyak diantaranya yang putus sekolah karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan mereka lebih memilih masuk dalam angkatan kerja (bekerja) membantu kegiatan ekonomi orang tua.

### **5.5 Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf)**

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang berumur 10 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program

---

pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator keteringgalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kependaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makasar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

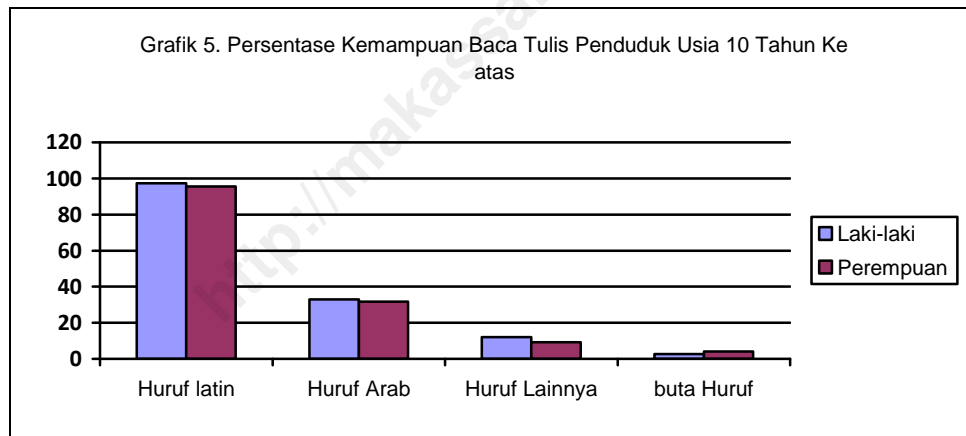
Tabel 5.5 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 10 tahun ke atas. Secara umum, selama kurun 2011-2012 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf. Tahun 2012 sekitar 96,63 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, atau turun sekitar 0,10 poin dari keadaan tahun 2011 yang mencapai 96,76 persen.

Telaah lebih lanjut menurut jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca dan menulis sekitar 95,91 persen tahun 2012 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis sekitar 97,40 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sebesar 3,37 persen, hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.. Namun demikian keadaan ini cukup menggembirakan, meski memang harus terus dilakukan peningkatan kinerja program pendidikan, sehingga semakin meminimalkan penduduk yang buta huruf.

Tabel 5.6  
Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas  
Kota Makassar 2011 – 2012

Jenis Kelamin	2011		2012	
	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Laki-Laki	507.796 (97,85)	11.150 (2,15)	527.152 (97,40)	14.096 (2,60)
Perempuan	540.854 (95,75)	24.004 (4,25)	543.220 (95,91)	23.195 (4,09)
Laki-laki + Perempuan	1.048.650 (96,76)	35.154 (3,24)	1.070.372 (96,63)	37.291 (3,37)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012



## 5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

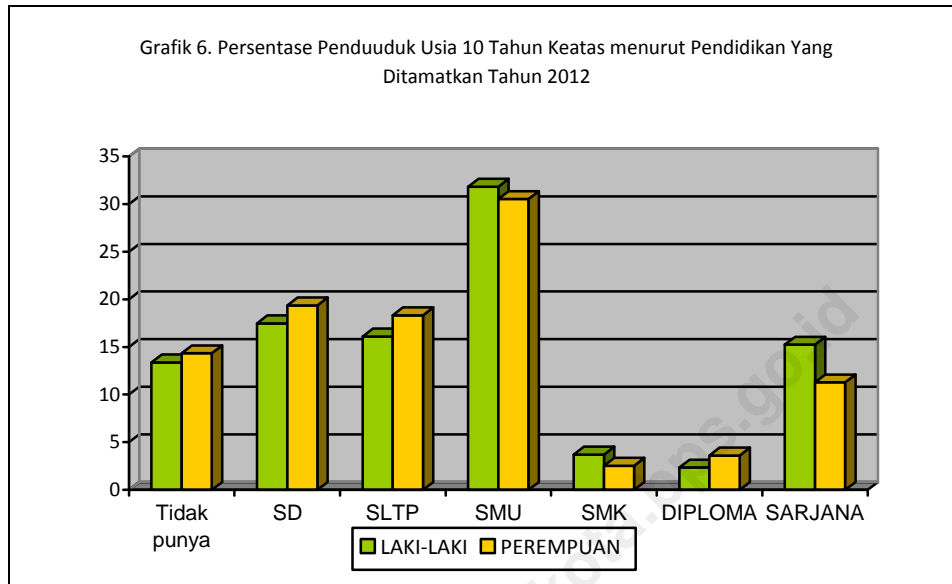
Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 5.7  
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan  
Yang Ditamatkan di Kota Makassar 2011 – 2012

Pendidikan Yang Ditamatkan	2011			2012		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya Ijazah	76.722 (16,34)	69.671 (13,61)	146.393 (13.97)	71.982 (13,30)	81.199 (14,34)	153.181 (13,83)
SD	92.534 (19,70)	116.689 (22,79)	175.616 (16.22)	94.676 (17,49)	109.704 (19,37)	204.380 (18,45)
SLTP	73.123 (15,57)	92.376 (18,05)	169.444 (15.66)	87.142 (16,10)	103.840 (18,33)	190.982 (17,24)
SMU	118.728 (25,28)	121.012 (23,64)	348.364 (32.19)	172.262 (31,83)	172.999 (30,54)	345.261 (31,17)
SMA Kejuruan	32.015 (6,82)	17.512 (3,42)	57.787 (5.33)	20.030 (3,70)	14.327 (2,53)	34.357 (3,10)
D I/II	1.828 (0,39)	3.985 (0,78)	6.426 (0.59)	1.016 (0,19)	2.161 (0,38)	3.177 (0,29)
D III	9.718 (2,07)	16.441 (3,21)	34.240 (3.17)	11.634 (2,15)	18.268 (3,23)	29.902 (2,70)
D IV/S1/S2/S3	56.190 (11,96)	56.441 (11,03)	139.886 (12.88)	82.505 (15,24)	63.917 (11,28)	146.422 (13,22)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012





Tabel 5.7 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2011-2012. Bahwa sebagai ibukota propinsi pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2012 sebagian besar penduduk yang berusia 10 tahun keatas berijazah SMA umum sebesar 31,17 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 32,19 persen.

Begitupun penduduk yang berijazah DIV/S1/S2/S3 mengalami penurunan dari 13,22 persen pada tahun 2012 menjadi 12,88 persen pada tahun 2011.

---

## BAB VI KETENAGAKERJAAN

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu 46able46 penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (Man Power), sedangkan di Indonesia menggolongkan penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Melalui konsep *Labour Force Approach* dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat dogolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk meghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah

pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal bernagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha.

### 6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2012. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja sekitar 52,18 persen penduduk usia 15 tahun keatas tergolong bekerja dan sekitar 5,78 persen yang sedang mencari pekerjaan.

Tabel 6.1  
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Slama Seminggu Yang Lalu  
Di Kota Makassar, 2011-2012

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	541.050 (55,86)	49.668 (5,13)	96.085 (9,92)	199.049 (20,55)	82.581 (8,53)
2012	514.556 (52,18)	56.951 (5,78)	152.181 (15,43)	206.144 (20,91)	56.250 (5,70)

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2011-2012

### 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah

---

angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas  
Di Kota Makassar 2011 – 2012

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(3)
2011	61,00	8,41
2012	57,94	9,97

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2011-2012

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun-tahun tersebut menunjukkan trend peningkatan TPAK dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 TPAK Kota Makassar sekitar 57,94 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 57 orang yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja.

Seperti di negara-negara berkembang pada, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data mengenai pencari pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tingkat pengangguran pada tahun 2011-2012 mengalami fluktuasi dengan trend yang cenderung naik. Pada tahun 2012 pengangguran terbuka tercatat sekitar 9,97 persen dibanding tahun 2011 yang hanya sekitar 8,41 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan, dibanding dengan keadaan tahun

2011. Kondisi ini dinilai cukup baik, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

### 6.3 Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2012, sektor perdagangan menyerap 31,96 persen pekerja di kota Makassar dan sektor jasa sebesar 36,96 persen.

Tabel 6.3  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar, 2011 – 2012

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2011			2012		
	L (2)	P (3)	L+P (4)	L (2)	P (3)	L+P (4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan perikanan	3.613 (1,06)	- (0,00)	3.613 (1,06)	2.336 (0,76)	0 (0,00)	2.336 (0,47)
Industri Pengolahan	17.477 (5,14)	13.065 (6,49)	30.542 (5,64)	12.082 (3,92)	15.884 (8,17)	27.966 (5,57)
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel	104.223 (30,69)	91.502 (45,42)	195.725 (36,18)	88.464 (28,73)	72.092 (37,09)	160.556 (31,96)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	98.375 (28,97)	82.109 (40,76)	180.484 (33,36)	101.155 (32,85)	84.525 (43,48)	185.680 (36,96)
Lainnya *)	115.902 (34,13)	14.784 (7,34)	130.686 (24,16)	103.880 (33,74)	21.890 (11,26)	125.770 (25,05)

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2011-2012

Catatan: Lainnya\*) Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Angkutan, Perdagangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

---

Pada table 6.3 diatas, selama tahun 2012 alokasi lapangan usaha sebagai tanda aktifitas ekonomi di Kota Makassar nampak terjadi pergeseran, meski sektor perdagangan dan jasa masih mendominasi. Pada sektor perdagangan terjadi penurunan daya serap, dari 36,18 persen di tahun 2011, turun menjadi 31,96 persen pada tahun 2012. Namun sektor jasa kemasyarakatan di tahun 2011 dari 33,36 persen, naik menjadi 36,96 persen pada tahun 2012. Dan sektor industri menurun sekitar 0,07 poin dari 5,64 persen menjadi 5,57 persen tahun 2012. Sektor Lainnya (Bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, Tanah dan jasa perusahaan) selama tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sekitar 0,89 poin, dari 24,16 persen menjadi 25,05 persen

Selaras dengan dominannya sektor perdagangan dalam menyerap tenaga kerja, jenis pekerjaan pada kelompok tenaga usaha penjualan nampak dominan pula. Pada tabel 6.4 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan terlihat turun 18,78 poin dari 42,59 persen tahun 2011 turun mencapai 23,81 persen tahun 2012, kemudian diurutan kedua ditempati oleh kelompok tenaga produksi, operator alat-alat dan pekerja kasar yang mencapai 29,53 persen tahun 2011. Turun menjadi 26,78 persen tahun 2012 atau turun sekitar 2,75 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tabel 6.4, pekerja laki-laki lebih cenderung pada kelompok tenaga produksi, operator alat-alat dan pekerja kasar. Sedangkan pekerja perempuan lebih dominan pada tenaga usaha penjualan. Untuk jelasnya dapat dilihat table berikut ini.

Tabel 6.4  
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar, 2011-2012

Jenis Pekerjaan	2011			2012		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Profesional	39.611 (10.59)	41.693 (14.26)	81.304 (11.96)	47.014 (15,26)	34.419 (17.71)	81.433 (16.21)
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	13.197 (4.15)	2.576 (1.36)	15.765 (3.11)	11.176 (3,62)	750 (0.39)	11.936 (2.38)
Tenaga Usaha Penjualan	36.043 (32.82)	43.249 (58.94)	79.296 (42.59)	58,612 (19,03)	10.527 (5.41)	119.621 (23.81)
Tenaga Usaha Jasa	103.45 3 (11.10)	90.777 (11.80)	194.216 (11.36)	65.668 (21.32)	70.403 (36.21)	136.071 (27.09)
Tenaga Usaha Pertanian	6.984 (2.20)	361 (0.19)	7.340 (1.45)	659 (0.21)	- (0.00)	659 (0.13)
Tenaga Produksi, Operator alat Alat angkutan dan Pekerja Kasar	124.335 (39.14)	25.483 (13.45)	149.740 (29.53)	106700 (34.65)	27.810 (14.31)	134.510 (26.78)

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2011-2012

#### 6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk, yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status pekerjaan ini dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status

pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas. Status pekerjaan ini juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal.

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2012, pekerja formal di Kota Makassar kebanyakan berstatus buruh/karyawan, dengan persentase mencapai 65,31 persen. Sementara pada sektor informal tahun 2012 ditunjukkan melalui persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri sebesar 14,89 persen, yakni 14,41 persen pekerja laki-laki dan 15,63 persen, sementara yang bekerja dengan status pekerja bebas di non pertanian seperti (buruh bangunan, pemulung, tukang cuci, tukang parkir) sekitar 7,02 persen yakni pekerja perempuan mencapai 3,55 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap mencapai sekitar 4,44 persen dan yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar sekitar 3,99 persen.

Tabel 6.5  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar, 2012

Status Pekerjaan Utama	2012					
	Laki-laki	%	Perempuan	%	L+P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	44.384	14.41	30.385	15.63	74.769	14.89
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	11.676	3.79	10.606	5.46	22.282	4.44
Berusaha dibantu buruh tetap	16.291	5.29	5.555	2.86	2.184	0.43
Buruh/karyawan	201.288	65.37	126.793	65.22	328.081	65.31
Pekerja bebas di non pertanian	28.377	9.22	6.896	3.55	35.273	7.02
Pekerja keluarga	5.901	1.92	14.156	7.28	20.057	3.99
Jumlah	307.917	100	194.391	100	502.308	100

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2012



### 6.5. Lama Jam Bekerja

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa 87,79 persen penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 90.71 persen laki-laki dan 83.18 persen perempuan pada tahun 2012.

Tabel 6.6  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar, 2012

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2012					
	Laki-laki	(%)	Perempuan	(%)	L+P	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	2.570	0,83	1.868	0,96	4.438	0,88
1 – 14	4.167	1,35	7.049	3,63	11.216	2,23
15 – 34	21.878	7,11	23.788	12,24	45.666	9,09
35 +	279.302	90,71	161.686	83,18	440.988	87,79
Jumlah	307.917	100	194.391	100	502.308	100

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakemas 2012

---

## **BAB VII**

### **PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan berpengaruh terhadap kesehatan.

#### **7.1 Status Penguasaan Rumah**

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Pada umumnya rumahtangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumahtangga di Kota Makassar. Selama kurun 2011-2012, nampak terjadi kenaikan pada penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri. Pada tahun 2011, bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh pemiliknya sendiri mencapai 58,54 persen, kemudian naik menjadi 58,61 persen di tahun 2012. Sedangkan penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status kontrak, milik orang tua/keluarga mengalami penurunan. Ini diasumsikan bahwa sekitar 41,30 persen rumah tangga yang belum punya rumah sendiri.

Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumahtangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan pendidikan dan lokasi tempat kerja.

Tabel 7.1  
Rumahtangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal  
Kota Makassar, 2010 – 2012

Status Penguasaan	2011	(%)	2012	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Milik Sendiri	180.355	(58.54)	183.539	(58,61)
Kontrak	44.357	(14.40)	44.743	(14,29)
Sewa	18.749	(6.09)	23.386	(7.47)
Bebas Sewa	10.769	(3.50)	8.810	(2.81)
Dinas	43.499	(14.12)	43.301	(13.83)
Milik orang tua/sanak saudara	8.400	(2.73)	9.268	(2,86)
Lainnya	1.961	(0.64)	122	(0,04)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

---

## 7.2 Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya.

Rata-rata luas lantai per anggota rumahtangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m<sup>2</sup> maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m<sup>2</sup>.

Keadaan rumahtangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2011 menunjukkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi sekitar 15,28 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m<sup>2</sup> sekitar 27,92 persen. Sementara itu, rumahtangga paling banyak menempati rumah dengan luas lantai 50-99 m<sup>2</sup>, yakni mencapai 33,86 persen, sedangkan rumahtangga dengan lantai terluas 100 m<sup>2</sup> keatas mencapai 22,94 persen.

Dengan melihat kondisi luas lantai bangunan tempat tinggal di kota Makassar, tampaknya masih perlu perhatian dari pihak terkait yang ditujukan terutama bagi rumahtangga yang menempati bangunan luas lantai yang relatif sempit.

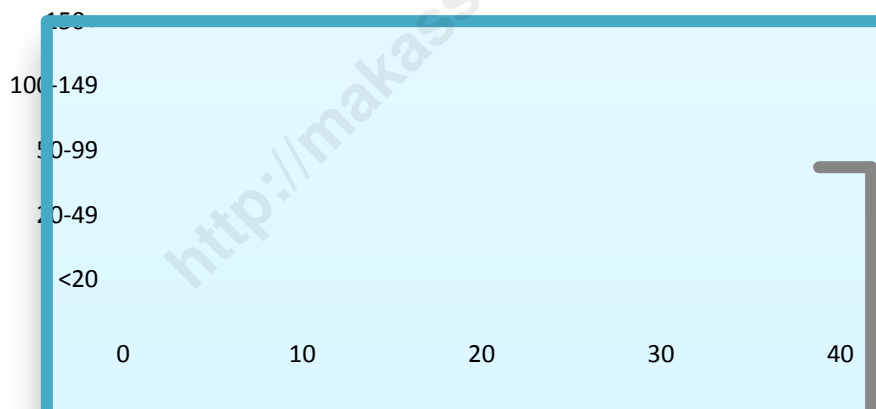
Tabel 7.2 memperlihatkan kondisi fisik bangunan yang ditempati oleh rumahtangga di Kota Makassar. Secara umum dalam kurun 2010-2011 distribusi rumahtangga menurut kondisi fisik bangunan tempat tinggal di Kota Makassar tidak mengalami perubahan yang berarti.

Tabel 7.2  
 Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar  
 Tahun 2010 dan 2011

Luas Lantai	2010	%	2011	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- < 20	43.594	(14,71)	47.077	(15,28)
- 20 – 49	79.907	(26,96)	86.025	(27,92)
- 50 – 99	106.060	(35,79)	104.306	(33,86)
- 100 – 149	38.580	(13,02)	37.504	(12,17)
- 150 +	28.233	(9,63)	33.179	(10,77)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2010-2011

Grafik 7  
 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai  
 Kota Makassar Tahun 2010 dan 2011

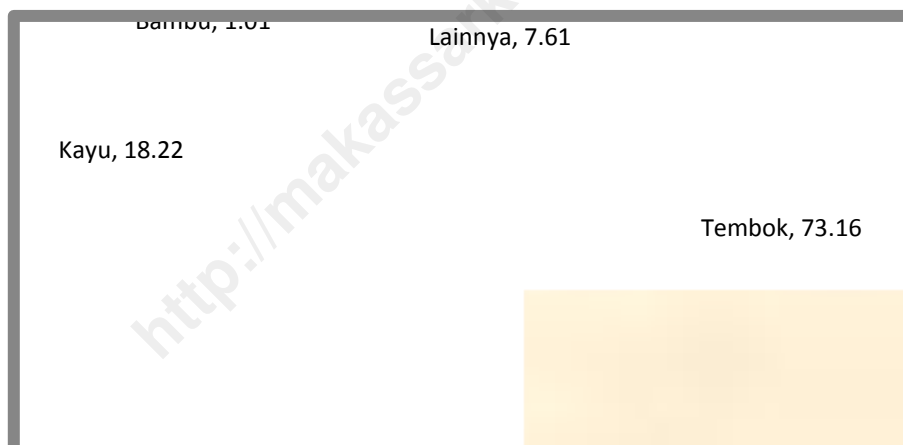


Tabel 7.3  
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar  
 Tahun 2011 dan 2012

Jenis Dinding	2011	%	2012	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Tembok	224.988	(73,03)	229.113	(73,16)
- Kayu	55.802	(18,11)	57.048	(18,22)
- Bambu	810	(0,26)	3.174	(1,01)
- Lainnya	26.491	(8,60)	23.833	(7,61)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

Grafik 8. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar, 2012



Keadaan rumahtangga menurut dinding terluas tahun 2011 dan 2012 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni sudah berupa tembok, yaitu sebesar 73,16 persen, berupa kayu sebesar 18,22 persen, berupa bambu 1,01 persen dan jenis dinding lainnya sebesar 7,61 persen. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumahtangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

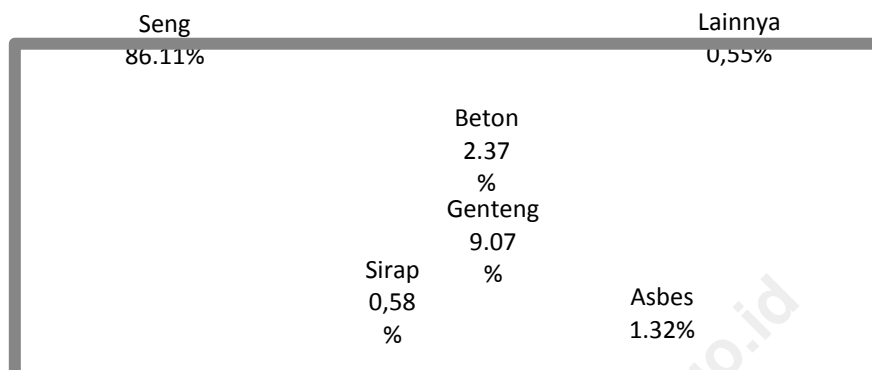
Pada tahun 2012 sebagian besar rumahtangga sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 86,11 persen.

Tabel 7.4  
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar  
 Tahun 2011 dan 2012

Jenis Atap	2011	%	2012	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Beton	9.348	(3,03)	7.420	(2,37)
- Genteng	16.658	(5,41)	28.400	(9,07)
- Sirap	2.038	(0,66)	1.825	(0,58)
- Seng	276.351	(89,70)	269.668	(86,11)
- Asbes	1.879	(0,61)	4.137	(1,32)
- Lainnya	1.816	(0,59)	1.718	(0,55)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011-2012

Grafik 9. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2011 dan 2012



Persyaratan lain dari rumah sehat, oleh Depkes adalah lantai rumah harus kering / tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau plur/semèn (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung).

### 7.3 Fasilitas Tempat Tinggal

#### 7.3.1 Sumber Air Minum

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dan pemilikan fasilitas air minum dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin banyak rumahtangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga. Demikian halnya dengan semakin banyaknya rumahtangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahteraannya. Air minum yang dianggap



memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air di distribusikan ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting. Ini mengingat semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh rumahtangga, yang tidak dapat diimbangi penyediaannya oleh alam secara memadai, mengingat daya dukung sumber daya yang terbatas.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat sumber air minum yang dikonsumsi rumahtangga adalah dengan melihat sumber air minum yang digunakan oleh rumahtangga tersebut.

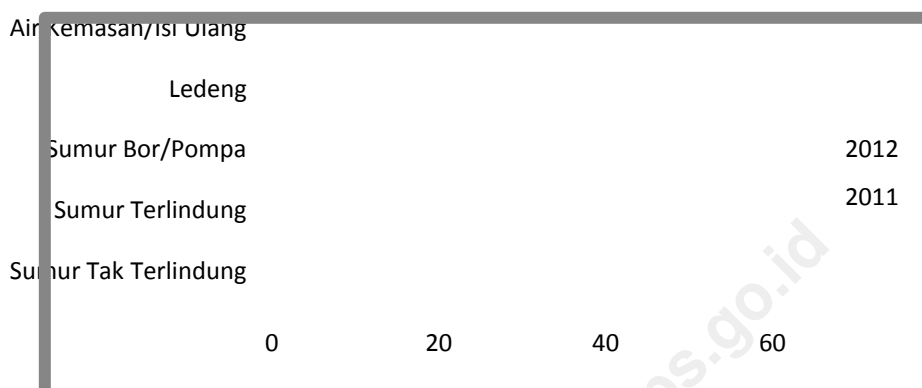
Rumahtangga di Kota Makassar tahun 2012 yang menggunakan air dalam kemasan/air isi ulang dan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air minum utama menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan masing-masing persentasenya sebesar 52,95 persen dan 41,89 persen. Sedangkan yang menggunakan air sumur bor/pompa sebagai sumber air minum yaitu sekitar 2,63 persen, air sumur terlindung sekitar 2,44 persen dan sumur tak terlindung sekitar 0,08 persen.

Tabel 7.5  
Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar  
Tahun 2011 dan 2012

Sumber Air Minum	2011	%	2012	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Air dalam kemasan/Isi Ulang	175.016	(56,80)	165.818	(52,95)
- Ledeng	112.566	(27,70)	131.200	(41,89)
- Sumur bor/pompa	13.530	(4,39)	8.237	(2,63)
- Sumur terlindung	5.831	(1,89)	7.653	(2,44)
- Sumur tak terlindung	790	(0,26)	260	(0,08)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2010-2011

Grafik 10. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar  
Tahun 2011 dan 2012



### 7.3.2 Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Dari table 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumahtangga dalam menggunakan tempat buang air besar dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumahtangga itu sendiri tahun 2011 sebesar 74,32 persen dan 70,48 persen tahun 2012, sedangkan untuk fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dengan digunakan bersama tahun 2011 sebesar 22,37 persen dan 24,21 persen tahun 2012. Selebihnya untuk fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh

rumah tangga yaitu fasilitas buang air besar ditempat umum sebesar 3,53 persen dan yang tidak ada sebesar 1,33 persen, utamanya untuk rumah tangga yang tempat tinggalnya diatas sungai atau rumah tangga yang tempat tinggalnya di pemukiman kumuh..

Tabel 7.6  
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Tinggal Di Kota Makassar  
Tahun 2011 dan 2012

Fasilitas Tempat Tinggal	2011	%	2012	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Fasilitas Tempat BAB</b>				
- Sendiri	78.672	(74,32)	220.726	(70,48)
- Bersama	23.676	(22,37)	75.813	(24,21)
- Umum	2.694	(2,55)	12.455	(3,98)
- Tidak ada	810	(0,77)	4.175	(1,33)
<b>Tempat Pembuangan Tinja</b>				
- Tangki	295.882	(96,04)	302.290	(96,53)
- Kolam/Sawah	514	(0,17)	233	(0,07)
- Sungai/Danau/Laut	7.022	(2,28)	4.255	(1,36)
- Lobang Tanah	3.417	(1,11)	1.667	(0,53)
- Pantai/Tanah Lapang/Kebun	1.183	(0,38)	2.721	(0,87)
- Lainnya	72	(0,02)	2.001	(0,64)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011 dan 2012

### 7.3.3 Fasilitas Penerangan

Fasilitas listrik juga banyak memberikan efisiensi dan produktivitas pada pemakaian sebagai sumber penerangan. Pada tabel 7.7 untuk sumber penerangan sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan listrik tanpa melihat apakah bersumber dari PLN maupun non

PLN. Untuk tahun 2012 yaitu sekitar 99,49 persen sudah menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN dan rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan listrik non PLN (Genset) utamanya masyarakat atau rumahtangga yang bertempat tinggal di daerah Pulau yaitu sekitar 0,38 persen dan sisanya sekitar 0,13 persen rumahtangga menggunakan sumber penerangan lain.

Tabel 7.7  
 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota Makassar  
 Tahun 2011 dan 2012

Fasilitas Penerangan	2011	%	2012	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Listrik PLN	305.828	(99,27)	311.583	(99,49)
- Listrik non PLN	1.793	(0,58)	1.178	(0,38)
- Petromaks	64	(0,02)	0	(0,00)
- Pelita/Lainnya	405	(0,13)	407	(0,13)

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2011 dan 2012

Grafik 11. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar  
 Tahun 2011 dan 2012



---

## BAB VIII

### INDIKATOR LAINNYA

Pengeluaran rumahtangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan, dimana menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumahtangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumahtangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

#### 8.1 Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Bagi rumah tangga dibanding dengan pemenuhan kebutuhan non makanan. Sebaliknya rumah tangga yang berpenghasilan tinggi atau relatif lebih besar, pengeluarannya cenderung lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non makanan. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka pola konsumsi lebih besar untuk keperluan konsumsi non makanan.

Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dikatakan membaik, jika perbandingan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan semakin menurun dan diiringi peningkatan kebutuhan untuk bukan makanan.

Pengeluaran perkapita menurut golongan pengeluaran perkapita makanan dan non makanan dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini.

Tabel 8.1  
Penduduk menurut Golongan pengeluaran perkapita per bulan  
Kota Makassar tahun 2012

Golongan pengeluaran	Makanan	%	Non Makanan	%	Jumlah
< 100.000	3.128	(0,23)	68.354	(4,99)	71.482
100.000 – 149.999	49.334	(3,60)	216.479	(15,81)	265.813
150.000 – 199.999	125.542	(9,17)	156.883	(11,45)	282.425
200.000 – 299.999	339.618	(24,80)	252.705	(18,45)	592.323
300.000 +	851.984	(62,21)	675.185	(49,30)	1.527.169
Jumlah	1.369.606	100,00	1.369.606	100,00	

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2012

Untuk kelompok pengeluaran perkapita makanan pada tahun 2012 relatif besar pada level Rp 300.000 keatas, yaitu makanan sebanyak 662.560 penduduk dan non makanan sebanyak 613.000 penduduk menurut golongan pengeluaran.

Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendapatan rumahtangga, maka pola konsumsinya akan lebih besar dibanding dengan masyarakat yang pendapatan rumah tangganya rendah.

Pengeluaran perkapita sebulan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 8.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Kota Makassar menurut pengeluaran makanan dan non makanan tahun 2012 sebanyak 1.369.606 rupiah. Golongan Pengeluaran diatas 300.000 rupiah untuk kebutuhan makanan dan non makanan tahun 2012 sebesar 62,21 persen kebutuhan makanan dan 49,30 persen untuk kebutuhan non makanan.

Tabel 8.2  
Pengeluaran perkapita sebulan dan pola konsumsi di Kota Makassar 2011-2012

Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)				Pola konsumsi penduduk (%)			
Makanan		Non Makanan		Makanan		Non Makanan	
2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
355.922	402.200	516.281	565.611	40,81	41,56	59,19	58,44

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2011-2012

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 pola konsumsi penduduk untuk non makanan pada tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 0,75 poin, yakni 59,19 persen tahun 2011 menjadi 58,44 persen tahun 2012 sedangkan untuk konsumsi makanan tahun 2012 sekitar 41,56 persen dibanding tahun 2011 yang hanya 40,81 persen atau naik sekitar 0,75 persen.

Hal ini menandakan bahwa pola konsumsi penduduk lebih ke konsumsi makanan dibandingkan ke pola konsumsi non makanan seperti sandang, pangan, perumahan dan lain-lainnya. Secara konsep hal ini tetap menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 lebih baik dibanding tahun 2011.

## 8.2 Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumahtangga miskin yang mengalami masalah/hambatan untuk dapat hidup secara layak, secara konseptual disebut sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .

---

Sesuai dengan defenisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan dsebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".



Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

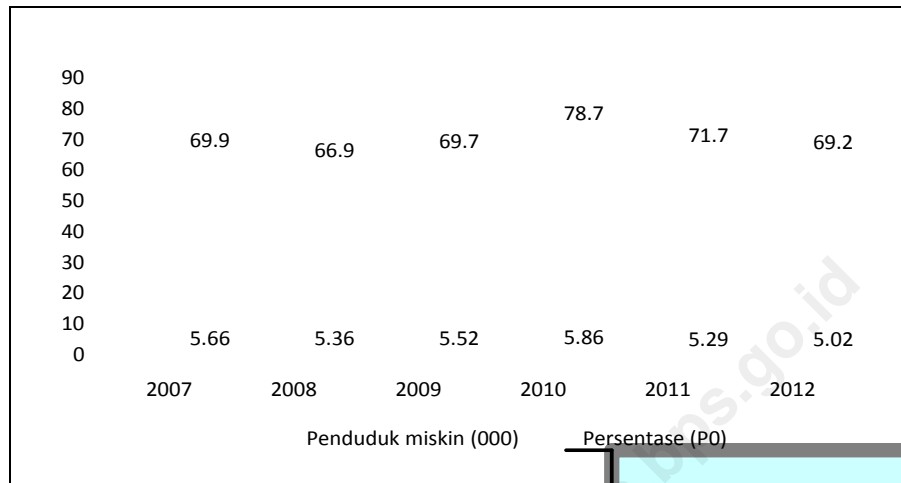
Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 8.3  
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar  
Tahun 2007 – 2012

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Pend.Miskin (000)	69,9	66,9	69,7	78,7	71,7	69,2
Persentase pend.Miskin (%)	5,66	5,36	5,52	5,86	5,29	5,02
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	131.584	177.064	209.582	233.815	242.034	250.542

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2007-2012

Grafik 12. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2007-2012



Jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan jika dibanding dengan tahun 2011. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2011 sebesar 2,5 ribu jiwa, yaitu 71,7 ribu jiwa pada tahun 2011 menjadi 66,2 ribu jiwa pada tahun 2012.

Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir ini dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2011 dan tahun 2012. Analisis ini mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan mencakup garis kemiskinan, kemiskinan. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel lampiran 3.

#### 8.2.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, khusus di Kota Makassar pada tahun 2011 – 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp.8.508,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 242.034,- pada tahun 2011 menjadi Rp.250.542 tahun 2012,-. (Tabel lampiran 3)

---

### 8.2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2012 sebesar 69,2 ribu jiwa, angka ini mengalami penurunan sebanyak 2,5 ribu jiwa dari tahun 2011 dengan jumlah penduduk miskin 71,7 ribu jiwa. Tetapi jika dilihat dari tingkat kemiskinan absolutnya atau persentase penduduk miskinnya tahun 2012 sebesar 5,02 persen, artinya Kota Makassar menduduki peringkat pertama di tingkat Propinsi dan untuk tingkat Nasional Sulawesi Selatan menduduki peringkat 17. (Tabel lampiran 3)

<http://makassarkota.bps.go.id>

Lampiran Tabel 1

Jumlah Penduduk Pertengahan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2011-2012

Kode	Kab/Kota	2010	2011	2012	Pertumbuhan 2010-2011 (%)	Pertumbuhan 2011-2012 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Selayar	121,905	123,283	124,553	1.13	1.03
2	Kab. Bulukumba	394,757	398,531	400,990	0.96	0.62
3	Kab. Bantaeng	176,984	178,477	179,505	0.84	0.58
4	Kab. Jeneponto	342,222	346,149	348,138	1.15	0.57
5	Kab. Takalar	269,171	272,316	275,034	1.17	1.00
6	Kab. Gowa	652,329	659,512	670,465	1.10	1.66
7	Kab. Sinjai	228,936	231,182	232,612	0.98	0.62
8	Kab. Maros	318,238	322,212	325,401	1.25	0.99
9	Kab. Pangkep	305,758	308,814	311,604	1.00	0.90
10	Kab. Barru	165,900	167,653	168,034	1.06	0.23
11	Kab. Bone	717,268	724,905	728,737	1.06	0.53
12	Kab. Soppeng	223,757	226,079	226,202	1.04	0.05
13	Kab. Wajo	384,694	388,985	389,552	1.12	0.15
14	Kab. Sidrap	271,801	274,648	277,451	1.05	1.02
15	Kab. Pinrang	351,161	354,652	357,095	0.99	0.69
16	Kab. Enrekang	190,175	192,163	193,683	1.05	0.79
17	Kab. Luwu	332,863	335,828	338,609	0.89	0.83
18	Kab. Tana Toraja	221,795	223,306	224,523	0.68	0.54
22	Kab. Luwu Utara	287,606	290,365	292,765	0.96	0.83
25	Kab. Luwu Timur	242,882	245,515	250,608	1.08	2.07
26	Kab. Toraja Utara	215,400	218,943	220,304	1.64	0.62
71	Kota Makassar	1,339,374	1,352,136	1,369,606	0.95	1.29
72	Kota Pare-Pare	129,542	130,563	132,048	0.79	1.14
73	Kota Palopo	148,033	149,421	152,703	0.94	2.20
	Sulawesi Selatan	8,032,551	8,115,638	8,190,222	1.03	0.92

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

Lampiran Tabel 2

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

		APS 7-12 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	95.17	99.39	97.28
	7302. Bulukumba	97.57	96.58	97.06
	7303. Bantaeng	92.92	95.75	94.22
	7304. Jeneponto	96.98	96.42	96.71
	7305. Takalar	95.43	98.43	96.91
	7306. Gowa	97.69	98.13	97.89
	7307. Sinjai	97.05	98.73	97.79
	7308. Maros	96.63	98.99	97.82
	7309. Pangkep Kepulauan	99.03	96.91	97.94
	7310. Barru	95.91	100.00	97.91
	7311. Bone	96.38	98.45	97.39
	7312. Soppeng	97.57	100.00	98.80
	7313. Wajo	97.04	96.75	96.90
	7314. Sidenreng Rappang	97.77	99.13	98.40
	7315. Pinrang	97.02	99.25	98.15
	7316. Enrekang	99.57	98.81	99.23
	7317. Luwu	95.36	98.62	97.09
	7318. Tana Toraja	97.75	97.38	97.58
	7322. Luwu Utara	96.42	99.15	97.70
	7325. Luwu Timur	97.20	99.75	98.36
	7326. Toraja Utara	99.10	99.02	99.06
	7371. Makassar	96.46	97.58	96.98
	7372. Pare Pare	98.16	99.40	98.82
7373. Palopo	99.47	100.00	99.75	
Provinsi	Sulawesi Selatan	96.99	98.22	97.59

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

Lampiran Tabel 3

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

		APS 13-15 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	92.33	89.26	90.97
	7302. Bulukumba	84.57	89.57	86.92
	7303. Bantaeng	65.23	77.76	71.93
	7304. Jeneponto	80.26	86.43	83.48
	7305. Takalar	83.25	87.41	85.44
	7306. Gowa	85.28	85.96	85.65
	7307. Sinjai	80.83	90.18	85.51
	7308. Maros	86.41	88.68	87.51
	7309. Pangkep Kepulauan	77.96	80.78	79.12
	7310. Barru	83.05	85.99	84.40
	7311. Bone	80.50	80.49	80.49
	7312. Soppeng	96.86	96.13	96.52
	7313. Wajo	62.42	89.00	75.70
	7314. Sidenreng Rappang	89.50	93.20	91.60
	7315. Pinrang	87.08	86.58	86.83
	7316. Enrekang	94.85	99.15	96.94
	7317. Luwu	83.61	92.85	87.54
	7318. Tana Toraja	98.00	96.34	97.20
	7322. Luwu Utara	78.14	91.49	84.13
	7325. Luwu Timur	91.23	91.70	91.47
	7326. Toraja Utara	96.00	95.99	95.99
	7371. Makassar	96.34	94.10	95.13
	7372. Pare Pare	83.59	99.18	91.37
7373. Palopo	89.67	96.24	92.50	
Provinsi	Sulawesi Selatan	85.69	89.71	87.69

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

Lampiran Tabel 4

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

		APS 16-18 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	66.77	73.71	70.61
	7302. Bulukumba	49.19	62.95	56.23
	7303. Bantaeng	50.20	49.87	50.05
	7304. Jeneponto	51.10	47.68	49.34
	7305. Takalar	63.38	45.88	54.49
	7306. Gowa	56.88	58.01	57.40
	7307. Sinjai	68.04	66.67	67.32
	7308. Maros	45.47	67.87	56.38
	7309. Pangkep Kepulauan	44.22	56.00	50.13
	7310. Barru	56.12	78.45	66.54
	7311. Bone	58.53	61.32	59.98
	7312. Soppeng	65.69	51.61	59.00
	7313. Wajo	46.63	54.30	50.76
	7314. Sidenreng Rappang	62.45	54.26	58.85
	7315. Pinrang	61.06	71.81	66.13
	7316. Enrekang	72.03	75.14	73.72
	7317. Luwu	55.77	75.34	65.77
	7318. Tana Toraja	75.45	63.46	70.32
	7322. Luwu Utara	63.39	64.45	63.93
	7325. Luwu Timur	54.78	64.13	59.13
	7326. Toraja Utara	71.71	62.35	66.78
	7371. Makassar	67.61	71.97	69.63
	7372. Pare Pare	55.40	77.29	65.73
7373. Palopo	66.88	77.42	72.25	
Provinsi	Sulawesi Selatan	59.53	63.77	61.60

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

Lampiran Tabel 5

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 19-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

		APS 19-24 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	21.40	24.23	22.95
	7302. Bulukumba	10.43	8.26	9.21
	7303. Bantaeng	13.71	12.48	13.01
	7304. Jeneponto	9.20	7.90	8.53
	7305. Takalar	12.39	17.40	14.92
	7306. Gowa	14.73	13.38	14.08
	7307. Sinjai	10.37	15.03	12.89
	7308. Maros	11.87	22.95	17.09
	7309. Pangkepene Kepulauan	11.55	17.79	14.76
	7310. Barru	27.07	28.35	27.73
	7311. Bone	15.81	16.44	16.16
	7312. Soppeng	14.99	10.26	12.79
	7313. Wajo	13.24	19.56	16.42
	7314. Sidenreng Rappang	22.95	24.30	23.61
	7315. Pinrang	16.13	24.58	20.26
	7316. Enrekang	21.61	23.36	22.42
	7317. Luwu	6.78	18.20	13.01
	7318. Tana Toraja	31.52	19.16	25.22
	7322. Luwu Utara	14.86	22.08	17.95
	7325. Luwu Timur	17.73	11.76	14.81
	7326. Toraja Utara	19.81	27.20	23.48
	7371. Makassar	44.10	36.53	40.22
	7372. Pare Pare	37.16	46.87	41.68
7373. Palopo	21.75	47.78	37.00	
Provinsi	Sulawesi Selatan	22.32	23.19	22.76

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas



Lampiran Tabel 6

Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kode	Kab/Kota	Kegiatan Utama					Total
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	32.759	87	4.179	375	2.477	39.877
2	Kab. Bulukumba	113.374	1.852	5.909	1.736	6.712	129.583
3	Kab. Bantaeng	47.694	2.915	1.828	0	7.435	59.872
4	Kab. Jeneponto	99.805	3.198	1.612	0	11.219	115.834
5	Kab. Takalar	74.510	3.657	7.892	1.178	3.796	91.033
6	Kab. Gowa	179.230	5.112	11.367	1.572	23.199	220.480
7	Kab. Sinjai	63.691	954	387	550	9.136	74.718
8	Kab. Maros	82.855	4.574	10.099	980	8.038	106.546
9	Kab. Pangkep	75.939	5.154	8.818	604	10.059	100.574
10	Kab. Barru	41.310	1.593	864	2.028	9.169	54.964
11	Kab. Bone	200.562	6.170	6.984	2.325	21.056	237.097
12	Kab. Soppeng	62.890	2.068	1.216	602	9.881	76.657
13	Kab. Wajo	112.924	2.385	676	718	17.723	134.426
14	Kab. Sidrap	72.669	3.245	8.299	131	8.725	93.069
15	Kab. Pinrang	83.240	3.341	2.004	1.588	24.856	115.029
16	Kab. Enrekang	53.869	751	282	424	6.894	62.220
17	Kab. Luwu	76.861	6.307	9.607	3.014	11.472	107.261
18	Kab. Tator	61.221	2.769	5.682	320	3.361	73.335
22	Kab. Luwu Utara	78.927	2.389	74	2.168	13.777	97.335
25	Kab. Luwu Timur	67.986	3.853	304	1.326	11.151	84.620
26	Kab. Toraja Utara	52.158	2.313	7.584	458	6.898	69.411
71	Kota Makassar	307.917	33.925	73.690	16.706	34.645	466.883
72	Kota Pare-Pare	30.649	1.331	1.203	2.087	7.726	42.996
73	Kota Palopo	33.631	3.235	3.621	5.637	2.887	49.011
Sulawesi Selatan		2.106.671	103.178	174.181	46.527	272.292	2.702.849

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 7

Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012

Jenis Kelamin : Perempuan

Kode	Kab/Kota	Kegiatan Utama					Total
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	19.305	1.663	4.462	18.442	2.056	45.928
2	Kab. Bulukumba	74.881	3.389	9.527	59.810	5.607	153.214
3	Kab. Bantaeng	37.133	3.486	2.588	19.252	4.030	66.489
4	Kab. Jeneponto	56.796	3.924	345	58.417	9.114	128.596
5	Kab. Takalar	39.272	3.878	9.991	45.258	5.219	103.618
6	Kab. Gowa	93.981	6.305	12.344	111.815	13.535	237.980
7	Kab. Sinjai	48.802	2.331	648	28.611	3.359	83.751
8	Kab. Maros	51.489	4.652	11.187	44.975	4.144	116.717
9	Kab. Pangkep	37.717	4.764	8.376	55.918	7.304	114.079
10	Kab. Barru	22.673	1.616	1.957	32.740	4.443	63.429
11	Kab. Bone	121.526	5.545	12.438	113.996	24.243	277.748
12	Kab. Soppeng	35.063	4.355	1.116	42.364	8.650	91.548
13	Kab. Wajo	55.531	3.062	890	83.260	13.039	155.782
14	Kab. Sidrap	32.041	4.628	8.068	54.783	4.269	103.789
15	Kab. Pinrang	43.484	3.818	2.136	71.751	7.402	128.591
16	Kab. Enrekang	36.851	2.106	340	20.151	3.934	63.382
17	Kab. Luwu	41.806	7.682	12.364	47.165	6.046	115.063
18	Kab. Tator	44.708	2.372	7.908	14.536	2.786	72.310
22	Kab. Luwu Utara	42.657	4.051		46.270	4.745	97.723
25	Kab. Luwu Timur	33.783	5.137	.757	36.304	3.920	79.901
26	Kab. Toraja Utara	37.835	2.504	8.435	18.095	2.559	69.428
71	Kota Makassar	194.391	21.671	74.905	184.753	20.264	495.984
72	Kota Pare-Pare	21.170	945	1.144	19.305	4.040	46.604
73	Kota Palopo	22.342	1.921	5.475	22.094	1.650	53.482
Sulawesi Selatan		1.245.237	105.805	197.401	1.250.065	166.628	2.965.136

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 8

Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012

Jenis Kelamin : Laki-laki + Perempuan

Kode	Kab/Kota	Kegiatan Utama					Total
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	52,064	1,750	8,641	18,817	4,533	85,805
2	Kab. Bulukumba	188,255	5,241	15,436	61,546	12,319	282,797
3	Kab. Bantaeng	84,827	6,401	4,416	19,252	11,465	126,361
4	Kab. Jeneponto	156,601	7,122	1,957	58,417	20,333	244,430
5	Kab. Takalar	113,782	7,535	17,883	46,436	9,015	194,651
6	Kab. Gowa	273,211	11,417	23,711	113,387	36,734	458,460
7	Kab. Sinjai	112,493	3,285	1,035	29,161	12,495	158,469
8	Kab. Maros	134,344	9,226	21,286	45,955	12,452	223,263
9	Kab. Pangkep	113,656	9,918	17,194	56,522	17,363	214,653
10	Kab. Barru	63,983	3,209	2,821	34,768	13,612	118,393
11	Kab. Bone	322,088	11,715	19,422	116,321	45,299	514,845
12	Kab. Soppeng	97,953	6,423	2,332	42,966	18,531	168,205
13	Kab. Wajo	168,455	5,447	1,566	83,978	30,762	290,208
14	Kab. Sidrap	104,710	7,873	16,367	54,914	12,994	196,858
15	Kab. Pinrang	126,724	7,159	4,140	73,339	32,258	243,620
16	Kab. Enrekang	90,720	2,857	622	20,575	10,828	125,602
17	Kab. Luwu	118,667	13,989	21,971	50,179	17,518	222,324
18	Kab. Tator	105,929	5,141	13,590	14,856	6,147	145,663
22	Kab. Luwu Utara	121,584	6,440		48,438	18,522	195,058
25	Kab. Luwu Timur	101,769	8,990	1,061	37,630	15,071	164,521
26	Kab. Toraja Utara	89,993	4,817	16,019	18,553	9,457	138,839
71	Kota Makassar	502,308	55,596	148,595	201,459	54,909	962,867
72	Kota Pare-Pare	51,819	2,276	2,347	21,392	11,766	89,600
73	Kota Palopo	55,973	5,156	9,096	27,731	4,537	102,493
Sulawesi Selatan		3,351,908	208,983	371,582	1,296,592	438,920	5,667,985

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 9

Penduduk Usia 15+ menurut Indikator Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut TPT dan TPAK  
Tahun 2012

Kode	Kab/Kota	Indikator AK (%)	
		TPT	TPAK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Selayar	3.25	57.57
2	Kab. Bulukumba	2.71	56.75
3	Kab. Bantaeng	7.02	64.84
4	Kab. Jenepono	4.35	62.05
5	Kab. Takalar	6.21	59.92
6	Kab. Gowa	4.01	57.19
7	Kab. Sinjai	2.84	54.96
8	Kab. Maros	6.43	74.50
9	Kab. Pangkep	8.03	59.67
10	Kab. Barru	4.78	76.25
11	Kab. Bone	3.51	65.63
12	Kab. Soppeng	6.15	67.32
13	Kab. Wajo	3.13	68.29
14	Kab. Sidrap	6.99	57.94
15	Kab. Pinrang	5.35	60.37
16	Kab. Enrekang	3.05	59.64
17	Kab. Luwu	10.55	57.57
18	Kab. Tator	4.63	56.75
22	Kab. Luwu Utara	5.03	64.84
25	Kab. Luwu Timur	8.12	62.05
26	Kab. Toraja Utara	5.08	59.92
71	Kota Makassar	9.97	57.19
72	Kota Pare-Pare	4.21	54.96
73	Kota Palopo	8.43	74.50
	Sulawesi Selatan	3.25	62.82

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 10

Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota  
Di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2012

Kode	Kab/Kota	Jumlah Pend.Miskin (000)		Persentase Pend.Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	16.7	16.1	13.49	12.87	224,541	247,483
2	Kab. Bulukumba	32.4	31.3	8.12	7.82	221,152	243,437
3	Kab. Bantaeng	16.5	15.9	9.21	8.89	177,829	195,810
4	Kab. Jeneponto	59.6	57.5	17.16	16.58	233,713	256,214
5	Kab. Takalar	27.4	26.4	10.04	9.59	223,999	246,782
6	Kab. Gowa	56.6	54.6	8.55	8.05	245,195	272,310
7	Kab. Sinjai	22.3	21.5	9.63	9.28	195,667	202,565
8	Kab. Maros	42.4	40.9	13.14	12.55	245,473	254,121
9	Kab. Pangkep	53.7	51.8	17.36	16.62	214,736	222,310
10	Kab. Barru	16.1	15.5	9.59	9.28	224,201	232,085
11	Kab. Bone	92.1	88.8	12.67	12.25	208,275	229,128
12	Kab. Soppeng	21.2	20.4	9.36	9.12	188,257	196,508
13	Kab. Wajo	31.4	30.3	8.06	7.83	217,273	226,640
14	Kab. Sidrap	17.3	16.7	6.29	6	204,705	213,350
15	Kab. Pinrang	28.9	27.9	8.12	7.82	197,445	208,563
16	Kab. Enrekang	29.2	28.2	15.18	14.44	212,826	221,101
17	Kab. Luwu	46.9	45.2	13.93	13.33	207,841	217,802
18	Kab. Tana Toraja	29.6	28.6	13.22	12.72	196,785	208,436
22	Kab. Luwu Utara	42.6	41.1	14.64	14.02	215,419	224,241
25	Kab. Luwu Timur	20.4	19.7	8.29	7.71	208,089	218,148
26	Kab. Toraja Utara	37.4	36.1	17.06	16.27	286,763	330,106
71	Kota Makassar	71.7	69.2	5.29	5.02	242,034	250,542
72	Kota Pare-Pare	7.7	7.4	5.91	5.58	216,236	234,029
73	Kota Palopo	15.3	14.8	10.22	9.46	212,176	225,306
Sulawesi Selatan		835,5	805,9	10,27	9,82	-	-

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

---

#### DAFTAR PUSTAKA

1. BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2011), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011, Sul Sel
2. BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2012), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012, Sul Sel
3. BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2011), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011, Sul Sel
4. BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2012), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012, Sul Sel
5. BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2010), Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Sul-Sel
6. BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2012), Indikator Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2012, Sul Sel
7. BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2012), Percepatan penyediaan Data Statistik dalam rangka Alokasi Dana Perimbangan Daerah, Penduduk Pertengahan tahun 2010-2012 Provinsi Sulawesi Selatan, 2012
8. BPS, Kota Makassar, (2012), Makassar Dalam Angka Kota Makassar, 2011-2012, Makassar
9. BPS, Kota Makassar, (2012), Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, 2011-2012, Makassar